

**POLICY BRIEF****ANALISIS PROGRAM PELAYANAN KB TERHADAP UNMET NEED DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 & 2023****Maeylani Putri Qarisma****Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang**

Dalam upaya menurunkan angka unmet need diperlukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas. Berdasarkan data SIGA DIY, persentase unmet need telah menurun dari 24% di tahun 2022 menjadi 14,6% pada tahun 2023, namun penurunan tersebut belum mencapai target nasional yaitu 8%. Demi memaksimalkan upaya penurunan angka unmet need dan cakupan kepesertaan akseptor KB aktif, analisis lanjutan diperlukan untuk mengetahui kendala dalam pelayanan KB yang telah berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Latar Belakang**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana (KB) dan Sistem Informasi Keluarga, Keluarga Berencana merupakan usaha dari Pasangan Usia Subur (PUS) untuk merencanakan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Dalam mengatur jarak kelahiran ini, dibutuhkan pelayanan KB berkualitas pada setiap PUS sehingga tidak terjadi *unmet need*. Unmet Need sendiri merupakan tidak terpenuhinya kebutuhan KB pada PUS yang mengakibatkan kesulitan dalam penjarangan kelahiran atau mungkin ingin berhenti sama sekali pada kehamilan, namun tidak menggunakan alat/obat/cara ber KB.

**Unmet Need di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pada 2021, persentase unmet need nasional mengalami penurunan terendahnya semenjak 2018 sebesar 5,3% PUS. Namun, ada tahun 2022 angka unmet need mengalami kenaikan sebesar 6,9%.

Data terbaru di tahun 2023 menunjukkan angka unmet need cenderung menurun menjadi 5,22% PUS. Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan kejadian unmet need. Menurut hasil pendataan pada website Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga (SIGA BKKBN) dalam laporan Pengendalian Lapangan (DALLAP), Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase kejadian unmet need sebesar 24% pada setiap PUS di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, persentase ini menurun menjadi 14,6% pada setiap PUS. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan angka unmet need dalam skala nasional pada tahun 2023 juga berpengaruh terhadap penurunan persentase unmet need di wilayah DIY.

**Kontribusi Peserta KB Aktif dan Baru**

Penurunan unmet need mungkin disebabkan telah terlaksananya program dengan baik sehingga dapat menambah jumlah PUS untuk ikut andil dalam kepesertaan KB.

# UNMET NEED KB

Peserta Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan -kegiatan KB dan menggunakan alat kontrasepsi dalam upaya membentuk keluarga yang berkualitas. Dalam hal ini, Peserta KB terbagi menjadi dua kategori yakni Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Peserta KB Aktif mengacu pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih produktif secara seksual dan saat ini tetap menggunakan alat kontrasepsi untuk menghindari kehamilan. Sementara itu, untuk Peserta KB Baru merupakan Pasangan usia Subur yang baru pertama kali memulai untuk menggunakan alat kontrasepsi atau bisa mencakup pada PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah pernah hamil atau keguguran. PUS yang mengalami kejadian unmet need berkesempatan untuk memiliki anak yang lebih banyak dengan didukung oleh faktor lain misalnya sosial ekonomi sehingga dapat menyebabkan anak mengalami stunting. Dalam hal ini, perlu adanya penanganan khusus terhadap PUS yang ingin ber KB namun tidak dapat mengakses atau mendapatkan KB.

## Peranan BKKBN

BKKBN merupakan lembaga pemerintahan yang berfokus untuk menyusun perencanaan sekaligus pelaksana program yang mampu membentuk keluarga berkualitas dan sejahtera. Salah satu program yang diusung oleh BKKBN adalah program pelayanan KB yang berguna untuk mengendalikan jumlah kelahiran dan merencanakan kehamilan yang lebih matang sehingga dapat terhindar dari permasalahan baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Salah satu sasaran yang menjadi capaian adalah penambahan akseptor KB aktif dan akseptor KB baru.

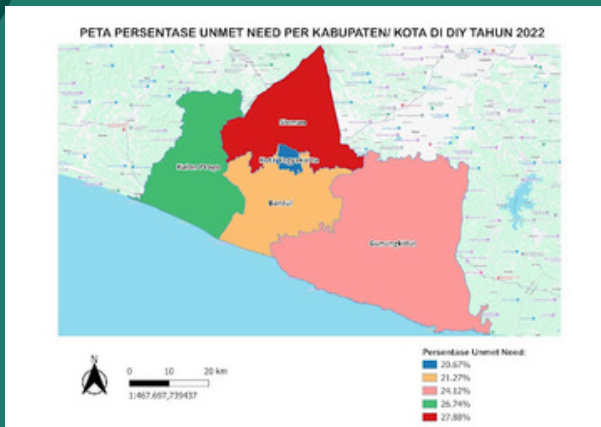
Hal ini dapat memungkinkan berkurangnya angka unmet need. Berdasarkan penjelasan diatas, telah terjadi penurunan angka unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 menjadi sebesar 14,6%, namun penurunan tersebut belum mencapai target nasional yaitu 8%. Oleh karena itu, diperlukan analisis evaluasi untuk mengukur capaian dan kendala-kendala dalam pelaksanaan program pelayanan KB.

## Pendekatan yang Digunakan

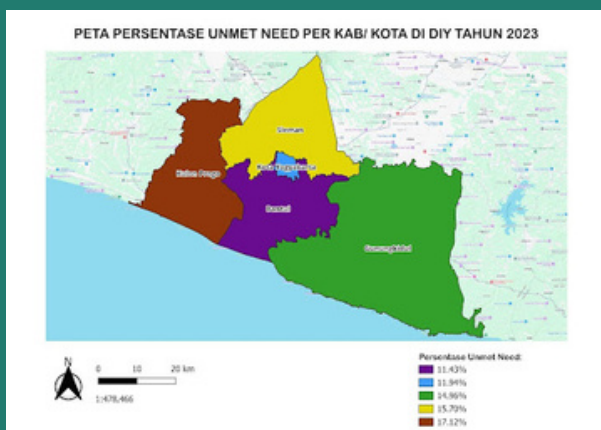
Analisis dan evaluasi dilakukan dengan metode *Cohort Retrospektif* berdasarkan data kuantitatif kewilayahan tingkat Kecamatan di seluruh wilayah DIY. Data tersebut mewakili 78 kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 dan 2023. Data diambil dari website resmi SIGA BKKBN yang mencakup variabel Persentase unmet need, Peserta KB Aktif (PA), Peserta KB Baru (PB), jumlah tempat pelayanan KB, jumlah PUS, Persentase Penyuluh KB, Persentase pengguna MKJP dan pengguna non MKJP pada tahun 2022 dan 2023.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis kewilayahan pada Gambar 1 dan Gambar 2, persebaran kejadian unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kab/Kota pada tahun 2022 dan 2023 telah mengalami penurunan yang lumayan signifikan, meskipun belum mencapai target nasional. Pada gambar 1, untuk wilayah yang menjadi titik tertinggi kejadian unmet need adalah Kabupaten Sleman sebesar 27.8%. Sementara itu, pada gambar 2 wilayah yang mengalami kejadian unmet need tertinggi dengan persentase 17.2% terdapat di Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 1. Persebaran Unmet need DIY 2022



Gambar 2. Persebaran Unmet need DIY 2023

Selanjutnya dilakukan analisis bivariat dengan uji korelasi yang dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel tersebut persentase unmet need berkorelasi sangat kuat dan berarah negatif terhadap persentase PA ( $p < 0,001$ ,  $r = -0,912$  dan  $r = -0,899$ ). Artinya semakin meningkat PA, maka akan semakin menurunkan kejadian unmet need. Hal ini terjadi karena PUS yang sudah mendapatkan edukasi dan menggunakan metode KB dapat membantu menurunkan unmet need.

**Tabel 3. Hubungan Variabel Bebas Terhadap Persentase Unmet Need di DIY Tahun 2022**

Variabel	r	r <sup>2</sup>	P-value
Persentase Peserta KB Aktif (%)	-0,912 <sup>a</sup>	0,832	<0,001*
Persentase Peserta KB Baru (%)	0,168 <sup>b</sup>	0,028	0,142
Jumlah Tempat Pelayanan KB	0,268 <sup>b</sup>	0,072	0,018*
Jumlah PUS	0,199 <sup>b</sup>	0,039	0,080
Persentase Pengguna MKJP (%)	0,447 <sup>a</sup>	0,199	<0,001*
Persentase Pengguna Non MKJP (%)	-0,447 <sup>a</sup>	0,199	<0,001*
Persentase Penyuluh KB (%)	-0,077 <sup>b</sup>	0,006	0,503

\*berkorelasi signifikan  
<sup>a</sup> uji pearson  
<sup>b</sup> uji spearman

**Tabel 4. Hubungan Variabel Bebas Terhadap Persentase Unmet Need di DIY Tahun 2023**

Variabel	r	r <sup>2</sup>	P-value
Persentase Peserta KB Aktif (%)	-0,899 <sup>a</sup>	0,808	<0,001*
Persentase Peserta KB Baru (%)	0,064 <sup>b</sup>	0,004	0,576
Jumlah Tempat Pelayanan KB	0,298 <sup>b</sup>	0,089	0,008*
Jumlah PUS	0,284 <sup>b</sup>	0,080	0,012*
Persentase Pengguna MKJP (%)	0,220 <sup>a</sup>	0,048	0,052
Persentase Pengguna Non MKJP (%)	-0,220 <sup>a</sup>	0,048	0,052
Persentase Penyuluh KB (%)	-0,204 <sup>b</sup>	0,041	0,073

\* berkorelasi signifikan  
<sup>a</sup> uji pearson  
<sup>b</sup> uji spearman

Unmet need berkorelasi positif dengan jumlah tempat pelayanan KB ( $p = 0,018$  dan  $p = 0,008$ ) ( $r = 0,268$  dan  $r = 0,298$ ) ini mengindikasikan semakin banyak tempat pelayanan KB, unmet need cenderung meningkat. Hal ini berarti masih banyak tempat pelayanan KB yang belum menyeluruh dan berkualitas. Atau justru unmet need yang tinggi mengakibatkan terbukanya tempat pelayanan KB yang terpusat di suatu wilayah. Berikutnya, jumlah PUS berkorelasi positif terhadap unmet need tahun 2023 ( $p = 0,012$ ) ( $r = 0,284$ ) yang menjelaskan semakin banyak PUS, unmet need juga cenderung meningkat meskipun korelasinya lemah.

Persentase pengguna MKJP berkorelasi positif terhadap unmet need tahun 2022 dengan ( $p = < 0,001$  dan  $r = 0,447$ ) yang menyatakan bahwa MKJP mungkin sering terjadi oleh pasangan usia tua atau yang sudah banyak anak, sementara populasi muda dengan unmet need lebih tinggi meningkat. Unmet need juga bisa muncul jika layanan pergantian metode KB tidak memadai. Terakhir, persentase pengguna non MKJP berkorelasi negatif terhadap unmet need 2022 ( $p = < 0,001$  dan  $r = -0,447$ ). Hal ini menandakan pengguna non-MKJP mungkin terkait dengan penurunan unmet need karena mereka berencana memiliki anak lagi dan dapat merencanakan kehamilan berikutnya dengan lebih baik.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Perwakilan BKKBN DIY untuk lebih meningkatkan pelayanan KB dan menurunkan unmet need di wilayah DIY:

1. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan KB yang merata di seluruh wilayah, termasuk ketersediaan metode kontrasepsi yang beragam, fasilitas untuk mengganti metode kontrasepsi, pemberian konseling komprehensif, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.
2. Memaksimalkan peran PKB dan PLKB dengan pemberian pelatihan kompetensi dan workshop keluarga berencana. Juga meningkatkan jumlah PKB dan PLKB agar merata, terutama di daerah yang masih sedikit petugas-nya dan tinggi unmet need-nya.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan KB di tiap kecamatan untuk lebih memahami kebutuhan dan permasalahan apa yang harus segera terpenuhi demi menurunkan unmet need dan meningkatkan kepesertaan KB.
4. Melakukan penelitian dan survei lanjutan berbasis data yang telah dikumpulkan dengan menggandeng instansi lain seperti LSM atau Perguruan Tinggi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan keluarga berencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. [2023]. Portal Satu Data Keluarga Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Data Pendataan Keluarga.
- BKKBN, Bappenas, Kemenkes RI, & UNFPA. [2021]. Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berbasis Hak untuk Percepatan Akses terhadap Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasikan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Indonesia. BKKBN.
- Kominfo RI. [2023, September 26]. Peringati Hari Kontrasepsi Sedunia, BKKBN Sasar 1,5 Juta Akseptor Melalui Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara. Artikel GPR.
- Kemenkes RI, & BKKBN. [2020]. *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*. Kemenkes RI.
- Mukti, D. A., & Prabawa, A. [2024]. Autokorelasi Spasial Unmet Need Keluarga Berencana di Pulau Sumatera Tahun 2022. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(5), 1220-1225. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i5.5060>
- Safitri, H., Siregar, K. N., Eryando, T., Herdayati, M., & Irawaty, D. K. [2021]. Pemberian Layanan Keluarga Berencana Berpengaruh Penting Terhadap Kejadian Unmet Need: Analisis Lanjut Data SDKI 2017. *Bikfokes*, 1(1), 66-78.
- Wahyuni, K. S., & Verawati, B. [2019]. Determinan Kejadian Unmet Need di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Gaster*, 17(1), 52-61. <https://doi.org/10.30787/gaster.v17i1.350>
- Widiastuti, K., & Widiastuti, N. M. R. [2021]. Pendampingan pada Pasangan Usia Subur dalam Penggunaan Kontrasepsi sebagai Upaya Menekan Unmet Need KB di Masa adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 806-810.